TINJAUAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA KONVEKSI PRAS 119 BANDUNG

Hajmi Meilisa Shaleha
Universitas Komputer Indonesia

ABSTRAK

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini dilakukan pada Konveksi Pras 119 Bandung. Fenomena yang terjadi ialah adanya rangkap jabatan pada bagian kas yang baik penerimaan dan pengeluaran kasnya dilakukan oleh orang yang sama sehingga pemegang kas sering kewalahan dan menyebabkan kesalahan pencatatan nominal penerimaan dan pengeluaran kasnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal penerimaan kas, masalah yang terjadi dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas serta cara mengatasi masalah yang dilakukan oleh Konveksi Pras 119 Bandung. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, metode deskriptif yaitu penulis tidak mengubah, menambah atau mengadakan manipulasi terhadap objek, hanya melihat lalu memaparkannya dalam bentuk laporan penelitian.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis menjelaskan bahwa sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 dengan tujuan untuk mengamankan harta sudah cukup baik tetapi akan lebih baik lagi jika pemegang kas diserahkan pada orang yang berbeda agar meminimalisir kesalahan pencatatan nominal dan masalah lainnya ketika pemilik usaha selaku pemegang kas satu-satunya sedang tidak dapat berada di toko, maka akan menyebabkan tidak adanya pemegang kas. Kelebihan dari laporan penelitian ini di banding dengan laporan sebelumnya yaitu pada pembahasan, penulis langsung memaparkan hasil penelitian sesuai dengan yang tercantum pada rumusan masalah.

Kata Kunci: Sistem, Pengendalian Internal, Penerimaan, Kas

ABSTRACT

Research conducted by the author was carried out on the Pras 119 Convection Bandung. The phenomena that occur is the double post both on cash receipts and cash expenditures by the same person so that holders of cash are often overwhelmed and cause recording errors of nominal cash receipts and disbursements. The purpose of this study was to determine the system of internal control of cash receipts, problems that occur in running the internal control system of cash receipts and how to fix the problem conducted by Pras 119 Convection Bandung. The method used by the author in this research is descriptive method, descriptive method is authors do not alter, add to or held manipulation of the object, just look at last expose it in the form of research reports.

Results of research conducted by the authors explain that the internal control system on a cash receipts Convection Pras 119 for the purpose of securing the property is quite good but would be better if the cashier handed over to different people in order to minimize recording errors and other problems when the nominal business owners as the sole holder of the cash was not able to be in the store, it will lead to the absence of the account holder.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. UMKM perlu diselenggarakan secara menyeluruh, optimal dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM).

Menurut **Mulyadi (2013:163)** Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal sebagai penunjang dalam menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-masing perusahaan karena jenis dan bentuk perusahaan yang berbeda-beda.

Pras 119 merupakan bentuk UMKM dalam bidang industri konveksi

yang kegiatannya memproduksi jaket, *T-shirt, sweater,* spanduk dan masih banyak lagi. Pras 119 merupakan UMKM yang sistem pengendalian internalnya masih harus ditingkatkan lagi karena sesuai dengan yang dicantumkan pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM bahwa UMKM mempunyai kedudukan, peran dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang dan berkeadilan. Pemerintah juga memberikan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran dan potensi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi. Maka, salah satu cara agar usaha konveksi pras 119 ini dapat berkembang lebih baik lagi dibutuhkan peningkatan sistem pengendalian internal penerimaan kas nya.

Menurut Bapak Sugeng Raharjo selaku pemilik usaha, Pada Konveksi Pras 119 terdapat masalah pada pengendalian internal penerimaan kas, seperti terdapatnya tugas penerimaan, pengeluaran dan pencatatan kas dibebankan pada 1 orang. Meskipun pemegang kas tersebut adalah pemilik usaha itu sendiri tetapi untuk penerimaan dan pengeluaran kas akan lebih baik lagi jika di bebankan pada orang yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai sistem Pengendalian internal pada konveksi pras 119 dengan judul **"TINJAUAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN KAS PADA KONVEKSI PRAS 119 BANDUNG".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian yang akan dilakukan penulis terkait dengan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 adalah adanya rangkap jabatan pada penerimaan dan pengeluaran kas.

1.3 Rumusan Masalah

Perumusan masalah adalah untuk mengidentifikasi persoalan yang diteliti secara jelas dan untuk mencari jawaban persoalan yang ingin dipecahkan. Arti penting dari perumusan masalah adalah sebagai pedoman bagi tujuan dan manfaat penelitian dalam rangka mencaapai hasil laporan yang sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119.
2. Apa saja masalah yang terjadi dalam sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119.

Bagaimana cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119 yang hasilnya digunakan oleh penulis untuk menyusun Tugas Akhir.

1.4.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119.
2. Untuk mengetahui masalah yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119.

Untuk mengetahui cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119.

II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Usaha Mikro Kecil dan Menengah

2.1.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Dalam perekonomian Indonesia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Kelompok ini terbukti tahan terhadap berbagai goncangan krisis ekonomi. Maka sudah menjadi keharusan pungutan kelompok usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah di atur dalam hukum berdasarkan Undang-Undang.

Menurut Undang-Undang No.20 tahun 2008 yang di maksud dengan usaha mikro, kecil dan menengah adalah sebagai berikut:

- Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,

atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

- Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2.2 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas

Menurut **Mulyadi (2013:3)** Sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut **Mardi (2011:59)** Pengendalian internal merupakan suatu sistem yang meliputi struktur organisasi beserta semua mekanisme dan ukuran-ukuran yang dipatuhi bersama untuk menjaga seluruh harta kekayaan organisasi dari berbagai arah.

Dari definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal adalah struktur organisasi yang dijalankan dengan tujuan mengamankan seluruh harta kekayaan organisasi, mengecek keandalan data akuntansi, memajukan efisiensi dan mendorong ketaatan pada kebijakan yang telah ditetapkan.

2.2.1 Pengertian Kas

Menurut **Harahap (2010:258)** Kas adalah uang dan surat berharga lainnya yang dapat diuangkan setiap saat serta surat berharga lainnya yang sangat lancar yang memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Setiap saat dapat ditukar menjadi kas.
2. Tanggal jatuh tempo sangat dekat.

Kecil resiko perubahan nilai yang disebabkan perubahan tingkat harga.

Menurut **Raja Adri Satriawan Surya (2012:66)** Kas *(cash)* adalah media pertukaran standar serta merupakan dasar akuntansi dan pengukuran untuk semua pos-pos lainnya.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kas adalah harta lancar yang digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi keuangan.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat disimpulkan sistem pengendalian internal penerimaan kas adalah suatu rangkaian yang meliputi struktur organisasi dan bertujuan untuk menjaga penerimaan kas perusahaan.

III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut **Husen Umar (2013:303)** objek penelitian adalah tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian, juga dimana dan kapan penelitian dilakukan, bisa juga ditambahkan dengan hal-hal jika di anggap perlu.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa objek penelitian adalah suatu hal yang di teliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan manfaat terntentu. Dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas pada Konveksi Pras 119 Bandung.

3.2 Metode Penelitian

Menurut **Sugiyono (2010:29)** metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan data termasuk tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses dengan tujuan tertentu.

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun laporan tugas akhir ini adalah metode deskriptif merupakan gambaran masalah yang terjadi pada objek yang di teliti.

Menurut **Sugiyono (2011:29)** metode deskriptif adalah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa melakukan anlisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Dari pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan masalah dengan cara mendeskripsikannya. Dengan metode ini penulis menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 Bandung.

3.2.1 Teknik Penggumpulan Data

Dalam pengumpulan data setidaknya dilakukan berbagai cara agar data yang diperoleh komplit atau sempurna sesuai dengan yang diinginkan agar penelitian berlangsung mudah. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah dilakukan dengan beberapa cara, sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah melakukan peninjauan secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan tugas akhir.Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari seluruh objek penelitian serta penulis melakukan pengamatan secara langsung pada Konveksi Pras 119 Bandung.

Adapun cara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah.

a. Pengamatan Langsung (*Observation*)

Menurut **Sutrisno Hadi** yang di kutip oleh **Sugiyono (2012:145)** observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan.

Penelitian ini dilakukan terhadap kegiatan dari objek penelitian dengan cara mengamati langsung pada Konveksi Pras 119 Bandung.

b. Wawancara (*Interview*)

Menurut **Ulber Silalahi (2012:312)** wawancara merupakan percakapan yang berlangsung secara sistematis dan terorganisasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai pewawancara *(interviewer)* dengan sejumlah orang sebagai responden atau yang diwawancara *(interviewer)* untuk mendapatkan sejumlah informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Penulis melakukan wawancara dengan pemilik usaha mengenai pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 Bandung.

c. Dokumentasi/mengumpulkan data (*Documentation*)

Menurut **Mahi M. Hikmat (2011:83)** teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Merupakan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh di Konveksi Pras 119 Bandung.

2. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Menurut **Suharsimi Arikunto (2010:45)** studi pustaka adalah metode pengumpulan data dengan cara mencari informasi melalui buku-buku, koran, majalah dan literatur lainnya. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan dengan membaca dan mempelajari tulisan-tulisan berupa buku-buku literature dan sumber bacaan lainnya yang berkaitan dengan objek pembahasan sebagai landasan teori.

3.2.2 Sumber Data

Sebuah data memiliki informasi namun sebuah data juga harus memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut dan bagaimana data tersebut di olah.

Sumber data terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Merupakan data yang langsung di dapat dan dijadikan sebagai sumber dari penelitian dan pengamatan secara langsung pada objek yang diteliti atau perusahaan tempat penulis melakukan penelitian, dimana dilakukan dengan cara penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak yang berkepentingan.

2. Data Sekunder

Menurut **Jonathan Sarwono** dan **Ely Suhayati (2010:69)** data sekunder adalah data yang sudah ada dan data tersebut sudah dikumpulkan sebelumnya untuk tujuan-tujuan yang tidak terlalu mendesak.

Dari penelitian ini sumber data yang digunakan oleh penulis adalah sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer sendiri diperoleh secara langsung yang dikumpulkan melalui *survey* lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung dari Konveksi Pras 119 Bandung, seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik usaha.

Sedangkan sumber data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber lain yang sudah tersedia sebelum penulis melakukan penelitian. Seperti data tentang pengertian menurut para ahli tentang sistem pengendalian internal peneriman kas yang didapatkan penulis dari hasil studi pustaka.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang penulis dapatkan dari Konveksi Pras 119 Bandung adalah data tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas, aktivitas perusahaan dan sistem pengendalian internal penerimaan kas.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Konveksi Pras 119 Bandung

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka telah diketahui sistem pengendalian internal penerimaan kas pada konveksi Pras 119 Bandung masih tergolong sangat sederhana dan masih butuh perbaikan dalam pengendalian internal penerimaan kasnya.

Menurut **AICPA (*American Institute Certified Public Account)*** yang dikutip oleh **La Midjan (2010:58)** Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi dan segala cara serta tindakan dalam suatu perusahaan yang saling terkoordinasi dengan tujuan untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan, menguji ketelitian akutansi, meningkatkan efisiensi operasi serta mendorong kekuatan terhadap kebijaksanaan yang telah digariskan oleh pimpinan perusahaan.

Menurut **Arrens dan Loebbecke** yang dikutip oleh **Amir Abadi Yusuf (2010:371)** Pengendalian Internal Penerimaan Kas mempunyai beberapa tujuan yaitu oleh perusahaan (keabsahan), potongan tunai telah diotorisasi (otoritasi), kas yang diterima telah dicatat dalam jurnal penerimaan kas (kelengkapan), penerimaan kas yang dicatat telah disetor dan dicatat pada jumlah yang diterima (penerimaan), penerimaan kas diklasifikasikan dengan pantas (klasifikasi), penerimaan kas dalam waktu yang sesuai (tepat waktu) dan penerimaan kas dicatat dengan pantas dengan berkas induk dan didkhtisarkan dengan benar (posting dan pengikhtisaran).

Pada usaha Konveksi Pras 119 ini memang sudah bertujuan untuk mengamankan harta, akan tetapi cara yang digunakan tersebut tidaklah tepat karena bagian pemegang kas seperti penerimaan, pengeluaran serta pencatatan kas dibebankan kepada satu orang. Sehingga struktur organisasinya masih harus diperbaiki agar tidak terdapat lagi rangkap jabatan.

4.2.2 Masalah yang Dihadapi Dalam Menjalankan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Konveksi Pras 119

Masalah yang terjadi dalam sistem pengendalian internal menurut **Hery (2013:159)** apabila sistem pengendalian internal tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, maka kemungkinan besar (hampir dapat dipastikan) akan timbul yang namanya inefisiensi (pemborosan sumber daya), yang pada akhirnya tentu hal ini hanya akan membebani tingkat profitabilitas (keuntungan) perusahaan. Salah satu hal yang paling riskan dalam pengendalian internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh karyawan (*employee fraud*). Kecurangan karyawan ini adalah tindakan yang disengaja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

Berikut ini adalah contoh utama yang memerlukan pengendalian internal secara baik:

1. Masalah penerimaan kas: Pengendalian internal dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa kas telah diterima dengan baik/semestinya oleh perusahaan.
2. Penanganan aset tetap: Pengendalian internal dijalankan dengan tujuan untuk memastikan bahwa aset yang dimiliki oleh perusahaan telah digunakan sebagaimana mestinya dan hanya untuk menunjang kegiatan opeasional perusahaan sehari-hari. Dalam hal ini, invetarisasi atas asset tetap perlu dilakukan agar supaya keberadaan aset tetap ini secara fisik dapat diawasi dengan mudah dan seksama.

Masalah yang timbul pada usaha konveksi Pras 119 ini seperti teori yang sudah dijelaskan diatas pada penerimaan kas memang sudah diterima dengan baik, tetapi karena pemegang kas baik dalam penerimaan maupun pengeluaran dibebankan pada satu orang maka sering terjadi kesalahan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas karena kurangnya ketelitian dan banyaknya transaksi yang harus dicatat.

4.2.3 Cara Mengatasi Masalah yang Dihadapi Dalam Menjalankan Sistem Pengendalian Internal Penerimaan Kas Pada Konveksi Pras 119 Bandung

Menurut **Hery (2013:162)** untuk mengatasi masalah dalam menjalankan sistem pengendalian internal salahsatunya untuk mengamankan aset dan meningkatkan keakuratan serta keandalan catatan (informasi) akuntansi, perusahaan biasanya akan menerapkan 3 prinsip pengendalian internal tertentu. Tentu saja ukuran dan luasnya pengendalian internal disesuaikan dengan besar kecilnya bisnis perusahaan, sifat/jenis bisnis perusahan, termasuk filosofi manajemen perusahaan. Masing-masing prinsip pengendalian internal akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penetapan tanggung jawab

   Sesungguhnya, karakteristik yang paling utama (paling penting) dari pengendalian internal adalah penetapan tanggung jawab ke masing-masing karyawan dapat bekerja sesuai dengan tugas-tugas tertentu (secara spesifik) yang telah dipercayakan kepadanya. Pengendalian atas pekerjaan tertentu akan menjadi lebih efektif jika hanya ada satu orang saja yang bertanggung jawab atas sebuah tugas/pekerjaan tertentu tersebut.

   Sebagai contoh, salah satu cara untuk mengamankan uang kas perusahaan adalah dengan menyetor uang kas hasil kegiatan operasional perusahaan secara harian ke bank dan jika tidak sempat menyetornya maka uang kas tersebut haruslah di simpan di dalam sebuah lemari (brankas) besi/baja. Dalam hal ini, perusahaan secara spesifik harus jelas menetapkan tugas penyimpanan uang kas ke dalam brankas hanya kepada satu orang tertentu saja, dimana hanya orang inilah yang nantinya akan memiliki kode akses untuk membuka brankas tempat penyimpanan uang kas tersebut. Jadi, jika seandainya terdapat pencurian atau kehilangan uang kas maka perusahaan dapat dengan segera meminta pertanggungjawaban dari satu orang tersebut, karena hanya dialah yang memiliki kode akses untuk membuka brankas uang kas perusahaan.
2. Pemisahan Tugas

Pemisahan tugas disini maksudnya adalah pemisah fungsi atau pembagian kerja. Ada 2 bentuk yang paling umum dari penerapan prinsip pemisahan tugas ini, yaitu:

1. Pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.
2. Harus adanya pemisahan tugas antara karyawan yang menangani pekerjaan pencataan aset dengan karyawan yang menangani langsung aset secara fisik (operasional).
   Sesungguhnya, rasionalisasi dari pemisah tugas adalah bahwa tugas/pekerjaan dari seorang karyawan seharusnya dapat memeberikan dasar yang memadai untuk mengevaluasi pekerjaan karyawan lainnya.

Ketika seorang karyawan bertanggungjawab atas seluruh pekerjaan, biasanya potensi munculnya kesalahan maupun kecurangan akan meningkat. Oleh sebab itu, sangatlah penting kalau pekerjaan yang berbeda seharusnya dikerjakan oleh karyawan yang berbeda pula.

3. Dokumentasi

   Dokumentasi memberikan bukti bahwa transaksi bisnis atau peristiwa ekonomi telah terjadi. Dengan membubuhkan atau memberikan tandatangan atau inisial ke dalam dokumen, orang yang bertanggungjawab atas terjadinya sebuah transaksi atau peristiwa dapat diidentifikasi dengan mudah. Dokumentasi atas transaksi seharusya dibuat ketika transaksi terjadi. Dokumen juga seharusnya bernomor urut tercetak (*preprinted & prenumbered*) dan seluruh dokumen tersebut seharusnya dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen yang bernomor urut sangat membantu untuk mencegah terjadinya pencatatan transaksi secara berganda serta juga membantu untuk mencegah terjadinya transaksi yang tidak di catat. Sedangkan dokumen yang bernomor urut tercetak dilakukan untuk menghindari terjadinya dokumen atas transaksi fiktif. Dokumen ini sebagai sumber bukti (pendukung) transaksi seharusnya dapat dengan segera diteruskan ke bagian/departemen akuntansi untuk menjamin pencatatan transaksi secara tepat waktu, akurat dan memenuhi kriteria kehandalan catatan akuntansi. Dokumen ini mencakup berbagai macam unsur seperti faktur penjualan, surat permintaan pembelian, jurnal penjualan, termasuk kartu absen dan sebagainya.

Berdasarkan teori di atas untuk mengatasi masalah dalam menjalankan sistem pengendalian internal, ada yang sudah dijalankan oleh Konveksi Pras 119 Bandung yaitu dengan menyetorkan uang hasil usahanya ke bank agar aman dan adanya dokumentasi atau tanda bukti atas pengeluaran dan penerimaan kas nya. Tetapi untuk mengatasi masalah yang lainnya belum diterapkan pada usaha Konveksi ini seperti belum adanya pemisahan tugas yang baik karena pemegang kas pada Konveksi Pras 119 masih dibebankan kepada satu orang, serta permasalahan baru yang timbul pada usaha Konveksi Pras 119 karena adanya rangkap jabatan dalam pemegang kas, maka jika sewaktu-waktu pemilik berhalangan hadir untuk bekerja di toko tersebut maka pemilik usaha mengatasinya dengan cara menugaskan karyawannya untuk memegang kas. Apabila pelanggan yang datang memesan dalam jumlah sangat banyak sehingga uang muka yang diberikan pun cukup banyak maka pelanggan akan disarankan untuk langsung mentransfer ke rekening pemilik usaha. Jika terjadi kesalahan pencatatan dalam penerimaan maupun pengeluaran kas maka akan dihitung ulang oleh pemegang kas dengan cara melihat kembali bukti atau nota pengeluaran dan penerimaan kas nya.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 Bandung, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 dimulai dengan pelanggan yang datang memesan produk lalu membayar uang muka sebesar 50%

dari total harga pesanan, uang di terima dan di catat oleh pemegang kas, kemudian uang di simpan dalam brankas. Jika nominal uang yang di terima cukup banyak maka uang tersebut akan ditabungkan di Bank. Buku tabungan akan di *print* oleh pihak Bank sebagai tanda bukti bahwa saldo kas tabungan sudah bertambah lalu pemilik usaha akan mencatat kembali di buku catatan kas bahwa pada hari, tanggal dan tahun tersebut Ia telah menabung dan saldo tabungan pun bertambah.

2. Masalah yang timbul di dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas yang dilakukan oleh Konveksi Pras 119 tentunya memiliki dampak yang kurang baik, seperti sering terjadinya kesalahan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas karena hanya satu orang yang ditugaskan untuk memegang kas, ketika pemilik usaha tidak dapat berada di toko maka menyebabkan tidak adanya yang memegang kas dan masalah penerimaan kas dari pelanggan yang tidak bertanggungjawab setelah memesan barang kemudian tidak melunasinya mengakibatkan kerugian.
3. Cara mengatasi masalah yang dihadapi dalam menjalankan sistem pengendalian internal penerimaan kas pada Konveksi Pras 119 yaitu ketika terjadi kesalahan pencatatan maka seluruh bukti-bukti penerimaan kas akan di koreksi dan di hitung kembali oleh pemegang kas agar nominalnya sesuai dengan penerimaannya, ketika pemilik usaha tidak dapat berada di toko maka pemegang kas diserahkan kepada pegawai dan untuk meminimalisir kerugian yang disebabkan oleh pelanggan yang tidak bertanggungjawab, pemilik usaha mengharuskan pelanggan yang baru pertama kali datang untuk memesan barang dengan memberikan uang muka sebesar 70% dari total harga barang yang di pesan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka penulis ingin memberikan saran untuk perusahaan yang semoga memberikan manfaat. Saran-saran yang dapat diberikan adalah:

1. Dengan tujuan mengamankan harta kekayaan perusahaan, Pemilik usaha Konveksi Pras 119 Bandung memilih untuk memegang kas nya sendiri, tetapi akan lebih baik lagi jika pemegang penerimaan dan pengeluaran kas diserahkan pada orang yang berbeda. Sehingga akan meminimalisir kesalahan pencatatan.
2. Pemilik usaha ingin sekali usahanya terus berkembang menjadi usaha yang lebih besar lagi, maka jejaring sosial dapat digunakan sebagai media periklanan untuk Konveksi Pras 119 untuk memperkenalkan produk-produk buatannya kepada masyarakat luas.
3. Sebaiknya untuk pemegang kas diberikan kepada orang yang kompeten atau ahli di bidangnya

DAFTAR PUSTAKA

Arrens, Alvin and James K Loebbecke. 2010. *Auditing An Integrated Approach.* 8th ed. New Jersey: Prentice Hall International Inc

Harahap, Sofyan. 2010. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan.* Jakarta: Bumi Aksara

Hery. 2014. *Akuntansi Dasar 1 dan 2,* Jakarta: Grasindo.

Husen Umar. 2013. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers

Jonathan Sarwono, Ely Suhayati.2010. *Riset Akuntansi Menggunakan SPSS .* Bandung: GrahaIlmu.

La Midjan dan Azhar Susanto. 2010.*Sistem Informasi Akuntansi***.** Jakarta: PT.

Gramedia Pustaka Utama.

Mahi M. Hikmat. 2011. *Metode Penelitian Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan*

*Sastra.*Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardi.2011. *Sistem Informasi Akuntansi.* Bogor. Ghalian Indonesia.

Mulyadi.2013. *Sistem Akuntansi*. Edisi 3. Jakarta. Salemba Empat.

Satibi, Iwan. 2011. *Teknik Penulisan Skripsi, Thesis dan Disertasi*. Bandung:

CEPLAS.

Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati. 2010 . *Auditing Konsep dasar dan Pedoman.*

Pemeriksaan Akuntan Publik: Graha Ilmu. Yogyakarta.

Raja Adri Satriawan Surya. 2012. *Akuntansi Keuangan Versi IFRS.* Graha Ilmu:

Yogyakarta.

Sugiyono.2011."*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan RD"*: Bandung:

Alfabeta 99.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian.* Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek.* Jakarta:

PT.Rineka Cipta.

Ulber Silalahi. 2012. *Metode Penelitian Sosial.* Bandung: PT.Refika Aditama.

Umi Narimawati, Sri Dewi Anggadini, dan Linna Ismawati.2010. *Penulisan Karya*

Ilmiah. Jakarta: Genesis Press.

Zaki Baridwan. 2010 . *Intermediate Accounting*. Edisi 8: BPFE. Yogyakarta.

Zaki Baridwan.2013 ."*Sistem Informasi Akuntansi*", Yogyakarta: BPEE UGM.

Damanik, Ericson. 2014. *Fenomena Bisnis Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.*

Melalui http://ondyx.blogspot.com/2014/02/fenomena-bisnis-usaha-kecil-dan.html

Sumber Undang-Undang:

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2008 tentang UMKM